

**PENGUATAN MODAL SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN**
*STRENGTHENING OF SOCIAL CAPITAL FOR EMPOWERMENT OF
RURAL POOR COMMUNITIES*

Roslianah

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan

Email: roslianahochi4@gmail.com

ABSTRAK

Modal sosial berkaitan dengan tingkat produktivitas, olehnya itu kajian modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumen, observasi, dan catatan lapangan. Selanjutnya data dianalisis dengan tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan dilakukan oleh pemerintah desa dengan menghidupkan norma resiprositas, kegiatan gotong royong, membentuk kelompok-kelompok ekonomi produktif, membentuk majelis taklim di desa, menghidupkan kegiatan-kegiatan olahraga bagi pemuda desa. Disarankan supaya pemerintah desa senantiasa memperbanyak kelompok-kelompok sosial yang bersifat formal maupun informal sebagai basis terendahnya modal sosial.

Kata Kunci: modal sosial, pemberdayaan masyarakat, miskin pedesaan.

ABSTRACT

Social capital is related to the level of productivity, therefore the study of social capital for community empowerment is very important. This study aims to analyze the model of strengthening social capital for the empowerment of the rural poor. The method used is qualitative with a case study strategy. Data was collected through interviews, document studies, observations, and field notes. Furthermore, the data were analyzed with the stages of data reduction, data display, and drawing conclusions/verification. The results showed that the strengthening of social capital for the empowerment of the rural poor was carried out by the village government by reviving the norm of reciprocity, mutual cooperation activities, forming productive economic groups, forming taklim assemblies in the village, activating sports activities for village youth. It is recommended that the village government always increase formal and informal social groups as the basis for the deposition of social capital.

Keywords: social capital, community empowerment, rural poor.

PENDAHULUAN

Kajian tentang modal sosial telah banyak dilakukan. Mereka menemukan bahwa semakin kuat modal sosial yang dimiliki masyarakat, semakin kuat pula masyarakat itu berpartisipasi dalam berbagai bentuknya (Putnam, 1993; Coleman, 1998; Fukuyama, 2001; Faisal, 2017). Di sisi lain, kajian

pemberdayaan masyarakat juga telah banyak dilakukan. Mereka telah memublikasikan berbagai model atau strategi pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2004a; Mardikanto dan Soebiato, 2013; Faisal, 2020).

Penelitian terhadap penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan belum dilakukan, kalau pun ada

masih sangat langka. Padahal diketahui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat membutuhkan elemen-elemen yang terdapat dalam modal sosial seperti jejaring yang kuat, trust norma-norma, kerjasama dan organisasi lokal di antara warga masyarakat. Keberadaan organisasi lokal dan jaringan yang kuat merupakan dimensi modal sosial yang sangat penting dalam membantu masyarakat desa menegosiasikan hubungan dengan pasar, negara, dan aktor masyarakat sipil lainnya (Bebbington, 1997). Lebih jauh, Bebbington (2000) menegaskan bahwa pembentukan modal sosial dapat memperluas akses rumah tangga dan masyarakat ke modal keuangan, alam dan manusia. Pandangan Bebbington ini berbeda dengan Rubio (1997) dalam membahas Kolombia-sebut sebagai modal sosial yang sesat-yang sangat menghambat pembangunan.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jeneponto tahun 2018 sebanyak 55.950. Pada tahun 2019 jumlahnya menurun menjadi 54.050 orang (BPS, 2020). Angka tersebut, oleh Badan Pusat Statistik memposisikan Kabupaten Jeneponto sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin paling tinggi dengan persentase 14,88 persen di Sulawesi Selatan (BPS Sulawesi Selatan, 2020).

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di daerah pedesaan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dari semua stakeholders untuk memfasilitasi masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini mengingatkan tentang hasil studi Narayan dan Nyamwaya (1996) di Negara berkembang mencatat kemiskinan partisipatif sebanyak 200.000 kelompok masyarakat aktif di daerah pedesaan Kenya, tetapi karena sebagian besar tidak terhubung dengan sumber daya luar maka mereka tidak mampu memperbaiki nasib mereka. Ini menunjukkan bahwa walaupun masyarakat sipil telah memiliki organisasi lokal yang aktif tetapi jika tidak memiliki jaringan yang luas, akan terkendala terhadap

aksesibilitas luar yang berpotensi dapat membantu meringankan beban mereka. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pemberian kekuatan kepada masyarakat tersebut mutlak diperlukan. Berbagai macam kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, maupun berupa kegiatan kolaboratif diantara mereka. Kegiatan pemberdayaan tersebut ada yang berbasis sektor seperti pertanian, nelayan, dan perkebunan, ada pula yang berbasis wilayah, dan juga ada yang berbasis modernitas (urban, rural, dan sub-urban)., Bahwa apapun basis yang dikembangkan, kegiatan tersebut memiliki empat macam elemen yang kurang lebih sama, yaitu: akses pada informasi, inklusi dan partisipasi akuntabilitas serta kapasitas organisasi lokal. Akses pada informasi diketahui akan dapat meningkatkan perbendaharaan pengetahuan tentang manfaat atau dampak positif suatu kegiatan. Dengan begitumaka masyarakat akan relaberpartisipasi terhadap proses atau perjalanan kegiatan yang dilaksanakan. Jika kegiatan membuka peluang segenap anggota masyarakat berpartisipasi aktif di dalamnya, maka kegiatan tersebut akan dapat bergerak lebih cepat dan mudah mempertanggungjawabkannya kepada publik.

Kerjasama, tindakan yang proaktif, *mutual trust*, *resiprocity*, dan jaringan kerja (*networking*) yang luas sebagai dimensi-dimensi dari modal sosial mutlak diperlukan. Modal sosial berkaitan dengan tingkat produktivitas. Modal sosial memiliki kapasitas untuk memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dengan memfasilitasi aliran ide-ide baru dan cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan dan menyelesaikan masalah (Lesser, 2000). Elemen-elemen modal sosial seperti kepercayaan, kohesifitas, altruisme, gotong royong, jaringan, dan kolaborasi sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui beragam mekanisme, seperti

meluasnya partisipasi dalam proses demokrasi, meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan publik, menguatnya keserasian masyarakat dan menurunnya tingkat kekerasan dan kejahatan (Blakeley dan Suggate, 1997; Suharto, 2005b).

Pemberdayaan masyarakat dengan skema dana desa melibatkan partisipasi masyarakat. Olehnya itu dibutuhkan umpan balik dari masyarakat. Proses pemberian umpan balik tersebut membutuhkan ruang sosial tempat mereka mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi serta merumuskan strategi yang harus dikembangkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ruang sosial sebagai tempat mereka memanfaatkan dan menciptakan peluang-peluang supaya program-program dana desa yang ada di desa mereka dapat memperoleh hasil yang optimal. Supaya rumusan strategi untuk menghadapi serta memanfaatkan dan menciptakan peluang dapat berjalan efektif dan efisien maka dibutuhkan kerjasama, keyakinan terhadap nilai-nilai positif terhadap perkembangan, norma-norma serta membutuhkan jejaring yang melembagakan hubungan sosial yang saling menguntungkan. Keberadaan ruang sosial tersebut mengikuti relasi-relasi kekuasaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks inilah modal sosial menjadi relevan dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Di sisi lain, modal sosial hingga kini belum mendapat perhatian yang memadai. Semakin melemahnya sejumlah elemen-elemen modal sosial dapat dijadikan sebagai gambaran bahwa upaya penguatan modal sosial pada masyarakat di pedesaan belum dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran empirik mengenai model penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan.

Metode Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Budaya dan tata nilai masyarakat perlu diungkap lebih mendalam sebagai basis tumbuhnya modal sosial. Di sisi lain, kegiatan pemberdayaan masyarakat ditandai dengan kegiatan-kegiatan peningkatan akses pada informasi, inklusivisme dan partisipasi akuntabilitas serta penguatan kapasitas organisasi lokal. Kegiatan-kegiatan tersebut diketahui membutuhkan elemen-elemen yang terdapat dalam modal sosial. Dengan alasan ingin mendapatkan keterangan ilmiah tentang penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat tersebut maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan penelitian kualitatif, peneliti berusaha berinteraksi dengan subjek penelitian secara alamiah, tidak menonjol, dan dengan cara yang tidak memaksa. Peneliti menyelidiki orang-orang dalam latar alamiah tentang bagaimana mereka berpikir dan bertindak menurut cara mereka. Dengan begitu diharapkan terungkap budaya dan tata nilai yang mereka anut sebagai basis tertambatnya modal sosial. Karena kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan adalah suatu aktivitas atau proses dari sekelompok individu, maka strategi kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Ini sesuai dengan pandangan Creswell (2010) bahwa studi kasus merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti meneliti secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.

Sebagai sumber data adalah unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan desa. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, studi dokumen, observasi dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Bungin, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Modal Sosial Masyarakat Pedesaan

Unsur-unsur modal sosial seperti norma sosial, nilai-nilai, trust, resiprosity, partisipasi dalam suatu jaringan, dan tindakan yang proaktif melekat kuat dalam sosio kultural masyarakat di Jeneponto. Masyarakat Jeneponto sangat kuat dalam menganut norma-norma sosial yang berlaku di komunitas mereka. *Siri'na pacce* menjadi spirit mereka baik dalam melakukan pekerjaan maupun dalam hubungan sosial yang lain. Begitu juga sangat patuh terhadap nilai-nilai yang mereka anggap baik dan bermanfaat. Di kalangan suku Makassar, masyarakat Jeneponto dikenal sebagai manusia yang memiliki semangat hidup yang tinggi dan pantang menyerah terhadap hal-hal yang mereka anggap baik. Dalam berinteraksi sangat menjaga *trust* diantara mereka. Demikian juga norma untuk saling membantu dan tolong menolong melekat kuat dalam jiwa mereka. Dalam masyarakat desamasih sangat kuat norma resiprositas. Norma resiprositas sangat tampak pada berbagai keadaan seperti ketika ada acara pesta pernikahan, sunatan atau lainnya. Bahkan dalam menjamu keluarga ketika ada pesta mereka memotong kuda sebagai jamuan yang mereka anggap sangat terhormat. Tidak hanya itu, mereka bahkan menambah satu ekor kerbau dengan harapan setiap tamu yang datang merasa senang terhadap acara yang dilaksanakan.

Sebagai masyarakat yang tinggal di desa, mereka memiliki frekuensi kontak dengan keluarga yang sangat tinggi. Letak rumah penduduk yang saling berdekatan dalam satu dusun menjadi penyebab mereka memiliki frekuensi kontak yang tinggi. Selain itu, dalam satu dusun mereka diikat oleh hubungan persaudaraan yang masih kuat. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki jenis pekerjaan yang relatif sama. Pekerjaan sebagai petani masih mendominasi jenis pekerjaan mereka. Pada pagi hari masih tampak mereka berbondong-

bondong ke sawah atau ke ladang yang tidak jauh dari permukiman penduduk. Mereka saling membantu mulai dari proses penanaman sampai kepada saat panen. Kerjasama dan saling tolong menolong berlangsung sepanjang tahun dan oleh karena itu tetap terjalin kohesifitas di antara mereka. Mereka diikat oleh tali persaudaraan yang masih kuat sehingga hubungan emosional mereka masih terjaga.

Partisipasi Sosial dan Komunitas

Salah satu karakteristik modal sosial dalam komunitas adalah partisipasi sosial dalam komunitasnya. Data hasil wawancara dengan MR (46) warga desa mengatakan bahwa mereka peduli terhadap kebersihan. Warga kampung peduli terhadap kebersihan. Ketika pagi hari sekitar pukul 06.00 – 08.00, mereka yang pada umumnya perempuan itu menyapu pada masing-masing pekarangan rumahnya. Tidak hanya memungut sampah yang ada di pekarangan rumahnya, tetapi juga memungut sampah yang di buang orang lain di sekitar tempat tinggal mereka. Partisipasi sosial juga terlihat ketika ada di antara warga yang akan melangsungkan pesta atau hajatan. Misalnya pesta perkawinan atau sunatan. Warga kampung berbondong-bondong ke rumah warga yang akan menyelenggarakan pesta tersebut. Mereka membawa kado yang dibungkus dengan kain sarung. Tampak pada raut wajah mereka yang ikhlas memberikan bantuan kepada warga yang punya hajatan tersebut. Mereka saling menyapa di perjalanan menuju rumah tujuan yaitu rumah tempat akan dilaksanakan pesta. Begitu pun ketika kembali ke rumahnya masing-masing. Tradisi tersebut sudah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun. Pada keadaan seperti ini, sebenarnya secara sosiologis mereka sangat taat terhadap norma resiprositas. Dikatakan demikian, karena tradisi tersebut dilakukan secara seimbang, dalam arti bahwa ketika warga yang tadinya membawa kado kepada warga lain, dan suatu saat warga yang

bersangkutan juga mempunyai hajatan baik pesta perkawinan atau sunatan maka warga tadi juga akan menerima kado dari warga lainnya, begitu dan seterusnya sebagai siklus tradisi yang tidak pernah putus. Ketika ada warga yang tidak mengikuti tradisi tersebut maka warga tersebut dianggap melanggar adat kebiasaan yang dalam bahasa Makassar disebut *tu tena ero' a'bija*.

Partisipasi sosial juga dilihat oleh penulis ketika masuk masjid untuk sholat dhuhur. Dalam masjid ramai diisi oleh anak-anak umur 7 sd 10 tahun yang sedang belajar membaca al quran. Ada sekitar 20-an anak yang sementara secara bergantian diajar oleh gurunya membaca qur'an. Ternyata gurunya berpartisipasi dalam membantu anak-anak untuk tahu membaca al quran. Bahkan kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari antara waktu dhuhur dan ashar. Banyaknya anak-anak yang ikut belajar membaca al quran juga menunjukkan adanya dukungan orang tua terhadap anak mereka. Ini adalah bentuk partisipasi sosial dalam komunitas mereka.

Sementara itu, partisipasi sosial tampak juga pada kegiatan gotong royong. Ketika ada warga yang ingin membangun rumah, mereka saling membantu dan bekerja bersama membangun rumah. Demikian juga ketika ada pembangunan masjid, warga dengan kompak bersama-sama datang ke masjid untuk bekerja. Memang ada tukang batu yang diberi upah setiap minggunya, tetapi jumlahnya sangat terbatas, kadang-kadang hanya 2 orang tukang dan yang lainnya adalah warga sendiri yang datang untuk saling membantu. Ada yang kerja membersihkan pasir, ada yang menyiapkan bahan campuran, ada yang mengangkat batu bata dan seterusnya. Budaya gotong royong di desa penelitian masih tampak, sehingga dapat dikatakan bahwa warga masih aktif terlibat dalam berbagai pekerjaan kelompok. Tidak hanya pekerjaan pembangunan masjid tetapi juga tampak pada pekerjaan membersihkan selokan.

Interaksi warga tidak bersifat eksklusif. Mereka tidak hanya berinteraksi dalam komunitas yang terbatas tetapi juga berinteraksi dengan berbagai pihak. Ketika penulis datang ke desa lokasi penelitian, warga menerima dengan baik begitu juga aparatur desa. Warga desa dengan senang ditanya tentang berbagai hal, demikian juga di kantor desa. Aparatur desa menceritakan tentang berbagai bantuan yang masuk ke desa yang sumbernya dari pemerintah kabupaten. Ada dari dinas sosial, dinas pertanian, dan lain-lain. Ini menjelaskan bahwa masyarakat desa mau dan mampu berinteraksi dengan berbagai pihak dan sekaligus menunjukkan tingkat modal sosial yang mereka miliki.

Partisipasi sosial tidak hanya pada kegiatan-kegiatan sebagaimana diuraikan di atas, tetapi yang sangat tampak adalah ketika ada warga dalam komunitas yang meninggal dunia. Ketika diumumkan di masjid bahwa ada warga desa yang meninggal dunia, maka pada saat itu juga mereka saling berdatangan. Mereka menunda pekerjaan yang sedang atau sementara akan dilaksanakan. Warga berbondong-bondong datang ke rumah duka sebagai bentuk turut belangsung kawa atas meninggalnya warga di komunitasnya. Warga desa di Jeneponto yang sebagian besar adalah warga NU itu mereka masih banyak melaksanakan upacara-upacara kematian dengan menghitung hari kematiannya. Tidak hanyadilangsungkan acaratakziahsebagaimana pada umumnya yang dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, tetapi juga sampai pada hitungan hari ke 40 setelah kematiannya dan bahkan ada yang memperingati hitungan 100 hari dari kematiannya. Pada setiap acara-acara tersebut, warga desa masih terus berpartisipasi dalam pelaksanaannya paling tidak mereka menghadiri acara penyelenggaraannya.

Begitu juga ketika ada warga yang sakit. Partisipasi sosial dalam komunitas lokalnya sangat tampak, mereka mengantar dan mengunjungi rumah sakit dalam jumlah yang

banyak sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap warga komunitasnya sekalipun pihak rumah sakit hanya membolehkan maksimal dua orang dari pihak keluarga yang merawat si pasien yang sakit. Tidak jarang terjadi ketegangan antara petugas rumah sakit dengan pihak keluarga. Kepedulian mereka juga tampak saat diantara mereka ada yang kena musibah seperti ketika terjadi kebakaran rumah tempat tinggal atau ada warga yang kecelakaan di jalanan, mereka berbondong-bondong untuk datang membantu. Fakta ini menunjukkan betapa tingginya rasa persaudaraan yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

Keterlibatan dan Pemberdayaan Sosial

Selain partisipasi sosial dalam komunitas sebagaimana diuraikan di atas, masyarakat di lokasi penelitian juga sering menghadiri pertemuan yang diadakan oleh komunitas lokal. Pertemuan tersebut seperti pembentukan kelompok tani, pemilihan ketua kelompok tani secara mufakat, dan kegiatan apa yang akan mereka kerjakan. Biasanya yang ditunjuk sebagai ketua dalam asosiasi mereka adalah warga yang memiliki harta kekayaan yang dikenal lebih banyak dan memiliki pengalaman memimpin dalam sebuah kelompok. Mereka juga memiliki keterlibatan dalam isu-isu lokal, misalnya ketika akan terjadi suksesi pergantian kepala desa dan perangkat desa di desa mereka. Siapa yang bakal menjadi calon kepala desa dan perangkat desa mereka sering bicarakan dalam pertemuan-pertemuan informal. Tetapi mereka jarang sekali membicarakan isu-isu nasional seperti tentang pandemic corona virus-19.

Himbauan pemerintah pusat tentang memakai masker ketika berinteraksi antara warga desa tidak tampak. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan pesta yang memungkinkan frekuensi kontak yang lebih besar pun mereka juga tidak menggunakan masker. Termasuk dalam kegiatan-kegiatan ibadah di masjid.

Mereka yang memakai masker hanya warga desa yang bekerja pada lembaga-lembaga lokal seperti di Kantor Desa dan di Puskesmas pembantu (Pustu). Di dalam masjid tidak tampak tanda-tanda adanya perintah untuk menjaga jarak ketika melaksanakan ibadah sholat. Berbeda dengan beberapa masjid di kota yang diberi tanda X pada shaf-shaf mereka sebagai bentuk anjuran untuk menjaga jarak ketika melaksanakan sholat berjamaah.

Tingkat kesadaran dan perhatian pada komunitas lokal masih tinggi yang ditandai dengan masih banyaknya warga yang saling mengunjungi ketika ada diantara mereka yang melaksanakan hajatan. Begitu juga kontak dengan elit desa masih tinggi, tidak hanya pada pertemuan-pertemuan formal di desa misalnya ketika ada urusan di kantor desa tetapi juga dalam pertemuan-pertemuan informal mereka. Ketika ada warga yang akan melaksanakan acara hajatan, mereka selalu menyampaikannya kepada kepala desa atau setidaknya disampaikan kepada kepala dusun. Dalam rapat-rapat baik formal maupun informal tampak adanya pengaruh dari elit desa yang menopoli pembicaraan. Seolah-olah mereka tidak bebas untuk berbeda pendapat dengan elit desa, padahal dalam rapat mereka diberikan kesempatan untuk memberikan gagasan-gagasan. Hanya satu atau dua orang yang tampak memberikan masukan dalam setiap pertemuan-pertemuan mereka. Ini menjelaskan bahwa tingkat perbedaan pendapat antara warga desa dengan elitnya sangat rendah sekaligus hal ini menunjukkan masih tingginya ketaatan dan bentuk kepatuhan warga desa terhadap elitnya. Dengan keadaan seperti ini, setiap ada kegiatan yang perlu ada kesepakatan sebelumnya tidak sulit untuk dilakukan.

Tingkat Rasa Percaya pada Sesama Warga Desa dan pada Institusi

Sebagai warga desa yang masih diikat oleh hubungan persaudaraan yang masih kuat,

mereka memiliki kepercayaan antara satu dengan lainnya yang masih tinggi. Masih banyak rumah warga desa yang belum dibatasi dengan pagar di antara rumah mereka. Mereka memiliki rasa saling percaya di antara tetangga yang masih tinggi. Tidak pernah lagi terjadi ada warga yang korban kriminal. Mereka merasa aman berjalan sendiri di jalanan umum di malam hari. Mereka tidak percaya kalau akan ada potensi individu untuk menjadi korban kriminalitas.

Tidak ada lagi kasus-kasus pencurian walaupun diakui kasus-kasus pencurian pernah terjadi di masa yang lalu. Kini mereka memiliki reputasi aman di area tempat tinggal mereka. Mereka memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap para tokoh masyarakat bahwa akan bertindak bagi kepentingan masyarakat desa. Demikian pula, warga desa percaya terhadap pemerintah desa bahwa mereka akan bertindak bagi kebaikan publik. Pemerintah desa telah mampu melayani warganya secara adil terutama ketika ada pembagian bantuan baik oleh pemerintah desa sendiri maupun bantuan yang berasal dari pemerintah kabupaten. Jenis bantuan yang mereka terima seperti bantuan pupuk, bibit, dan racun, termasuk sarana produksi lainnya. Bantuan untuk para petani tersebut berasal dari Dinas pertanian, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

Tingkat Proaktif di Kegiatan Sosial

Pada umumnya masyarakat Jeneponto dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Mereka tidak hanya saling mengunjungi antara warga dalam komunitas lokal, tetapi juga sering saling mengunjungi antara keluarga yang berada di luar komunitas lokal. Ini terutama ketika ada acara-acara keluarga terutama dalam menghadiri pesta pernikahan dari keluarga mereka. Rasa persaudaraan yang masih tinggi sehingga jarak dan besarnya biaya tidak menjadi alasan untuk tidak saling

mengunjungi. Mereka memiliki tingkat persaudaraan dan rasa solidaritas yang tinggi.

Sumber pengetahuan yang terbanyak adalah dari keluarga mereka sendiri yang terutama yang sudah lama tinggal di luar komunitas. Informasi tentang bibit unggul atau harga suatu komunitas mereka peroleh ketika terjadi saling mengunjungi di antara mereka. Dalam lingkup pemerintah desa pada dua desa lokasi penelitian belum ada sarana khusus sebagai pusat informasi desa yang mudah diakses, misalnya radio desa atau website mini di desa. Informasi dari pemerintah desa kepada warganya masih mengalir dari aparat desa kepada warga desa secara konvensional, yaitu melalui kepala dusun yang selanjutnya informasi desa disampaikan melalui mimbar-mimbar di masjid terutama pada hari Jumat.

Modal sosial adalah seperangkat nilai atau norma yang dibawa oleh anggota kelompok di dalam komunitas yang memungkinkan kerjasama di antara mereka. Jika anggota komunitas yakin bahwa anggota yang lain dapat dipercaya dan jujur, maka mereka akan saling percaya. Kepercayaan itu seperti pelumas yang membuat komunitas atau organisasi dapat dijalankan lebih efisien. Norma-norma yang menghasilkan modal sosial meliputi nilai-nilai kejujuran, menunaikan kewajiban, dan berlangsung secara timbal-balik.

Norma-norma positif tersebut berasal dari keluarga dan mempengaruhi motivasi individu untuk berkelompok, membangun keakraban dan saling membantu. Potret tersebut terlihat dalam kehidupan di lingkungan RT, lorong, kelompok arisan, pengajian, dan posyandu di lokasi penelitian. Secara tidak langsung norma-norma keluarga tersebut akan dibawa keluar oleh anggota keluarga dan terlembaga melalui proses internalisasi menjadi nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Norma-norma keluarga yang awalnya dipengaruhi tata nilai sosial dan lingkungan sebaliknya bisa berbalik arah mempengaruhi nilai-nilai sosial secara positif. Demikianlah timbal balik

diantara norma keluarga dan nilai sosial yang makin memperkuat modal sosial. Program-program pemerintah yang hadir untuk memberdayakan masyarakat hanya berfungsi untuk mempercepat pencapaian target pembangunan dari aspek dukungan teknis, karena jaringan kerjasama telah bekerja alami di masyarakat.

Masyarakat berkelompok untuk memenuhi kebutuhan sosial dan memperbaiki kehidupannya. Kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani yang sudah terbentuk sejak lama di dua desa lokasi penelitian. Hasil wawancara dengan kepala urusan perencanaan di desa Maccini Baji diperoleh informasi bahwa di Desa Maccini Baji terdapat 11 kelompok tani dengan tanaman unggulan adalah padi, jagung kuning, kacang tanah, kacang hijau, cabe rawit dan pohon naga. Mereka membangun kerjasama dalam mengelola tanah pertanian mereka. Ini menunjukkan bahwa tujuan sosial dapat dicapai secara alamiah melalui kerjasama antar anggota kelompok maupun antar komunitas berdasar norma-norma kerjasama yang telah membudaya. Lambat laun kebiasaan kerjasama akan melahirkan kemampuan membagi peran (*job deskripsi*), kemampuan memberikan penghargaan (*reward*) bagi yang dinilai berprestasi dan sanksi (*punishment*) bagi yang melanggarnya serta kemampuan mengatur diri sendiri (*self governance*). Dengan demikian pemerintah desa pada dua lokasi penelitian dalam menjalankan pembangunan niscaya terbantu oleh kemampuan komunitas-komunitas tersebut. Himpunan masyarakat atau komunitas tersebut menurut *Alexis de Tocqueville* (*Fukuyama 2005; 24*) merupakan tempat belajar untuk memerintah sendiri dan mengajarkan kepada anggotanya kebiasaan bekerjasama yang kemudian dibawa ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kerjasama merupakan substansi modal sosial. Tanpa modal sosial tidak akan ada masyarakat sipil, dan tanpa masyarakat sipil tidak ada demokrasi yang berhasil (*Fukuyama; 2005; 24*).

Pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan mempertaruhkan keberhasilannya di atas jaringan norma dan jaringan kerjasama yang dibangun oleh masyarakat tersebut. Tidak dipungkiri bahwa modal sosial adalah aset, karena telah menumbuhkan rasa saling percaya dalam bekerjasama. Kerjasama berperan penting mewujudkan model pemerintahan desa yang baik. Selama ini dalam kehidupan masyarakat berlangsung beragam aktivitas yang didasari modal sosial. Seluruh aktivitas tersebut berjalan dalam keteraturan karena diikat oleh norma-norma yang berlaku. Norma-norma tersebut berfungsi sebagai pengatur, penggerak dan pembatas interaksi. Semakin lama masyarakat semakin terbiasa mengatur perilaku dan pola hubungan antar mereka, baik itu hubungan ekonomi, sosial maupun politik. Kebiasaan itu dalam kurun waktu yang panjang akan membudaya dan melembaga. Dalam perkembangannya masyarakat makin terorganisir, teruji kemampuannya untuk mengatur diri sendiri dan terampil memecahkan aneka persoalan. Masyarakat yang demikian ini disebut sebagai masyarakat sipil (*civil society*) atau yang dalam nomenklatur PNPM Mandiri Perkotaan disebut dengan Organisasi Masyarakat Warga (OMW). Program-program pemerintah yang dijalankan dalam masyarakat yang memiliki *trust* (tingkat kepercayaan) dan kemampuan kerjasama yang kuat dipercaya akan berjalan lebih optimal.

Pemerintah, institusi pendidikan, LSM dan organisasi kemasyarakatan lainnya dapat memupuk perkembangan Modal Sosial atau sebaliknya. Yang disebut pertama kemungkinan akan memberikan hasil maksimal jika pemerintah dan segenap komponen masyarakat dan para perencana pembangunan memahami sepenuhnya dari mana sumber energy yang membentuk Modal Sosial tersebut. Diskusi tentang dari mana sumber keberadaan dan energi Modal Sosial perlu jelas dan informatif untuk diketahui oleh para pengambil kebijakan.

Modal sosial tersebut bersumber atau *by product* dari agama, tradisi dan pengalaman-pengalaman bersama yang selalu berulang di tengah masyarakat, dan ini di luar kemampuan dan kontrol pemerintah. Ketika kebijakan-kebijakan publik dirancang, seyogyanya pemerintah menyadari bahwa Modal Sosial yang tumbuh di masyarakatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Secara khusus pada dua desa yang menjadi lokasi penelitian pembentukan organisasi keagamaan adalah bagian dari upaya pemerintah desa untuk memberikan penguatan kepada modal sosial. Demikian juga upaya pembentukan organisasi lainnya seperti kelompok tani, wanita tani, karang taruna termasuk PKK adalah bagian dari upaya memperkuat modal sosial itu sendiri.

Ajaran agama yang dihubungkan atau disampaikan pada kegiatan keagamaan baik di pondok pengajian, remaja masjid, maupun di majelis taklim adalah dalam rangka memperkuat nilai-nilai dalam masyarakat. Kejujuran adalah ajaran agama yang fundamental dalam nuansa kebersamaan di komunitas desa. Kemudian akan tercipta apa yang disebut oleh Fukuyama sebagai saling percaya (*mutual understanding*) di antara mereka. Menurut Fukuyama (2005) bahwa agama merupakan salah satu sumber utama Modal Sosial. Perkumpulan-perkumpulan keagamaan sangat potensial untuk menghadirkan dan membangun suatu bentuk dan ciri tertentu dari Modal Sosial. Ajaran agama merupakan salah satu sumber dari nilai dan norma yang menuntun perilaku masyarakat. Agama lah yang menjadi sumber utama inspirasi, energi sosial serta yang memberikan ruang bagi terciptanya orientasi hidup penganutnya. Tradisi yang telah berkembang secara turun temurun juga sebagai sumber terciptanya norma-norma dan nilai, hubungan hubungan relasional antar masyarakat serta kelompok-kelompok sosial. Tatanan yang terbangun merupakan produk kebiasaan yang turun temurun, dan kemudian membentuk kualitas Modal Sosial. Kelompok-

kelompok masyarakat yang terbangun oleh suatu organisasi sosial yang khas dan berbasis kepada garis keturunan merupakan salah satu di antara sekian sumber yang melahirkan Modal Sosial. Hanya saja perlu dicermati lebih jauh, bahwa modal sosial yang terbentuk dari produk-produk dengan kehidupan masyarakat yang masih tradisional biasanya memiliki radius modal sosial yang pendek. Mereka hanya patuh pada elit lokalnya saja dan cenderung menghasilkan pandangan-pandangan yang negatif dari luar kelompoknya. Sehingga, jika dicermati maka penulis dapat membagi 2 jenis modal sosial yang ada di dua desa lokasi penelitian yaitu Modal Sosial Positif dan Modal Sosial Negatif. Modal sosial positif memiliki radius yang panjang, sementara modal sosial yang negatif memiliki radius yang pendek. Menguatnya modal sosial positif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ternyata institusi lokal seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, organisasi wanita tani, dan lembaga-lembaga keagamaan seperti pondok pengajian, remaja masjid dan majelis ta'lim, serta institusi lokal lainnya dapat dijadikan dasar berpijak bagi masyarakat lokal di lokasi penelitian oleh karenanya modal sosial dapat berkembang dan juga dapat mengalami erosi dan serta menguatnya modal sosial pada masyarakat lokal dapat dipotret melalui institusi lokal.

Potret Positif modal sosial dapat digambarkan dalam formulasi kepercayaan (*trust*) yang meliputi kohesi sosial, empati, transparansi, militan (*inklusif*) yang kesemuanya itu akan berdampak pada memunculkan kontrol sosial baru, revitalisasi modal sosial baru, perlu membangun kerjasama dengan pihak luar, demokrasi dan desentralisasi. Norma harus diwujudkan dalam bentuk kesetaraan dan kemitraan sehingga tidak muncul perbedaan perlakuan antarwarga, dalam alokasi ini akan muncul kendala kebudayaan luar, anomali primordialisme dan *vested interest* sehingga perlu dipersiapkan

jawaban kedepan guna membenteng tantangan yang akan muncul.

Sementara itu, Potret Negatif modal sosial dapat digambarkan dalam formulasi melemahnya modal sosial sehingga modal sosial mengalami erosi dalam bentuk: interaksi sosial, ditandai dengan pelanggaran norma, krisis kepemimpinan, kerenggangan hubungan sosial dan dehumanisasi. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya kontrol sosial, sentimen kelompok, meningkatnya semangat individualisme dan merebahnya nilai budaya material. Bila kondisi ini dibiarkan maka akan berakibat pada anomalis, pembangkangan, konflik dan perilaku menyimpang. Komunitas, muncul sikap baru dari komunitas dalam bentuk apatis, pragmatis, pengingkaran dan budaya menerobos. Sikap ini muncul karena disebabkan oleh tidak ada kepercayaan, rendahnya rasa kebersamaan, egoisme, dan menghalalkan segala cara. Jika kondisi ini tidak segera diantisipasi, maka yang muncul adalah stagnan (kemandegan), menurunkan partisipasi, pelanggaran nilai sosial dan dimungkinkan kesalahpahaman dalam masyarakat.

Apabila erosi modal sosial dalam interaksi sosial dan komunitas benar-benar terjadi, maka institusi lokal akan kehilangan *social trust* yang ditandai dengan rasa kecurigaan, rasa tidak aman, menurunnya rasa kebersamaan, pembangkangan, dan akan menyebabkan rendahnya keterbukaan sehingga intensitas komunikasi rendah, tingginya manipulasi publik dan dampak yang paling parah adalah disintegrasi sosial pada masyarakat pedesaan.

Modal sosial yang negatif akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya saling percaya sesama warga yang menyebabkan perangkat kendali semakin berlapis. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya perilaku kepentingan diri dan menurunnya sifat saling memberi. Mengapa? Karena timbulnya saling curiga dan antipati. Akibatnya masyarakat mengalami stagnasi yang dicirikan oleh rendahnya kreativitas

dan inovasi yang ditemukan. Dalam situasi seperti itu berarti terjadi pemborosan sumber daya dan pada gilirannya akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Institusi lokal dan modal sosial ternyata mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap komunitas lokal oleh karena itu perlu ada penguatan terhadap institusi lokal.

KESIMPULAN

Model penguatan modal sosial yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam merancang kebijakan-kebijakan publik di desa yang dapat mendorong untuk tumbuh dan munculnya energi modal sosial dalam masyarakat desa seperti penguatan kepemimpinan masyarakat setempat, kelompok masyarakat tingkat dusun, menghidupkan norma resiprositas, majelis taklim tingkat dusun, manajemen sosial, dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik yang dapat mendukung pemberdayaan masyarakat desa.

Bentuk resiprositas yang dihidupkan di desa seperti saling membantu antar warga desa yang dilandasi dengan semangat gotong royong menjadi determinan pokok dalam penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat desa. Demikian juga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dialirkan setara kepada semua warga desa, maka masyarakat desa merasa terlindungi dari potensi lahirnya kekuatan yang dominan dan dapat menggeser keberdayaan masyarakat miskin desa. Kuasa yang ada pada pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendistribusikan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Dunia, (1997). *The Social Capital of Self Mutual Aid Groups*” Social Policy, 28:30-38.

- BPS, (2020). Kabupaten Jeneponto dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- BPS, (2011), Sulawesi Selatan dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- BPS, (2020). Sulawesi Selatan dalam Angka. Badan Pusat Statistik.
- Burhan Bungin, (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Coleman, J.S. (1988). *Social Capital in The Creation of Human Capital*. The American Journal of Sociology, 94(Supplement): S95-S120.
- Cox, Eva. (1995). *A Truly Civil Society*. Sydney. ABC Books.
- Chambers, Robert., (1996). *PRA Participatory Rural Appraisal Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.
- Creswell, John.W., (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Cohen, D, & Prusak, L. 2001. *In Good Company: How Sosial Capital Make Organizations Work*. Harvard Business Press.
- Faisal, M. (2017). *Modal Sosial Usahawan Pendatang di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan*, Sosiohumaniora, 19(1), 70-76.
- Faisal, M. (2020). *Land Conversion And The Level Of Community Social Cohesion In The Sub-District Of Empoang District Binamu Jeneponto Regency*. Sosiohumaniora. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i2.25970>
- Faisal, M. (2020). *Empowerment Model for the Poor Communities in Urban Areas: A Study on low Income Households in Makassar*, Society, 8(2), 517-528.
- Francois, P. 2003. *Social Capital and Economic Development*. London: Routledge.
- Friedman, John., (1992) *Empowerment: The Politics of Alternatif Development*. Cambridge. Blackwell.
- Fukuyama, Francis. (1998). *The End of History and the Last man*. (Introduction Reproduced 2005). Penguin.
- Fukuyama, Francis. (1995). *Trust: The Social Virtues and The Creation of Prosperity*. NY: Free Press.
- Fukuyama, Francis. (2001). *Social Capital, Civil Society, and Development*. Third world Quarterly, 22(1):7-20.
- Fukuyama, Francis., (1999). *Social Capital and Civil Society*. Institut of Public Policy. George Mason. University.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat Mamadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta. PT. Pustaka CIDESINDO.
- Lesser, E. (2000). *Leveraging Social Capital in Organization*. In Eric Lesser (ed.), *Knowledge and Social Capital: Foundation and Applications*, 3-16. Boston: Butterworth-Heinemann.
- Mardikanto, Totok dan Soebiato, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Nahapiet, J, & Ghoshal, S. 1998. *Social Capital, Intelectual Capital, and The organizational advantage*. The Academy of Management Review, 23(2): 242-267.
- Hasbullah, J. (2006). *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Cetakan Pertama. Jakarta. MR-United Press.
- Harry Hikmat, (2013). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi. Bandung. Penerbit Humaniora.
- Hidayat, A., Hikmatullah, dan D. Santoso. (2000). *Potensi dan Pengelolaan Lahan Kering Dataran Rendah*. Dalam A. Adimihardja, L.I. Amien, F. Agus dan D. Djaenuddin (ed.) *Sumberdaya Lahan Indonesia dan Pengelolaannya*. Bogor.

- Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
- Putnam, Robert D. (1993). *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. TAP4(13).
- Miles., Matthew B dan Huberman A. Michael., (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*; Penerjemah, Tjetjep Rohendi Rohidi; Pendamping, Mulyarto, Cet. I. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press).
- Narayan., D. (2002), 'Social Capital: evidence and implications', hlm. 269-295 dalam P. Dasgupta dan Serageldin (eds), *Social Capital: a multifaceted perspective*, Washington, World Bank.
- Odum., Eugene P., (1994). *Dasar-Dasar Ekologi*, Penerjemah: Ir. Tjahjono Samingan, M.Sc. Edisi Ketiga. Bulaksumur, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Suharto, Edi dkk., 2004a. *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*, Bandung. STKSPress.
- Soeriaatmadja, R.E., (2003). *Ilmu Lingkungan*. Bandung. ITB.
- Solow, R. (2000). Notes on Social Capital and Economic Performance, In Dasgupta, P, & Serageldin, I (Ed). *Social Capital: A Multifaceted Perspective*. The World Bank.
- Kostov, P and J. Lingrad. (2001). *Integrated Rural Development – Do We Need a New Approach?. 73rd Seminar on the European Association of Agricultural Economists*, 28030 June 2001, ANCONA. http://nwu.fig.net/pub/morocco/proceedings/TS4/TS4_3_gur_et_al.pdf. [07/04/2004].
- Usman, Sunyoto, (2012). *Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan: Kasus Kampung Laut, Cilacap*, Kerjasama Prodi Pengelolaan Infrastruktur dan Pembangunan Masyarakat, Sekolah Pasca Sarjana UGM dan Yayasan Sosial Bina Sejahtera, Cilacap.
- Usman, Sunyoto, (2018). *Modal Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Qianhong Fu, (2004). *Trust, Social Capital, and Organizational Effectiveness*. Blacksburg, VA. April 2004.